**PEMAHAMAN PENGUSAHA WARUNG MAKAN TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK USAHA
DI DESA BANDUNG**

Oleh :

1. Irza Triwahyuni (1960301100004)
2. M. Muzaki Wildan G. (1960301100004)
3. Nevi Costari (1960301100039)

Dosen Pengampu :

R.Gesah.M.P.S.E.Ak.M.M

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of taxation and taxes, taxpayers, and food entrepreneurs in the village area of Bandung. In the area of Bandung village, there are many types of businesses carried out by the surrounding community or immigrant communities, where the businesses they run are mostly food businesses. In which the income of an area is mostly derived from the results of tax collection, both personal tax, business tax. This study uses qualitative methods and information is also used through interviews with other sources or respondents. This study measures to find out all the understanding and awareness of the community, especially the food stall entrepreneurs in the Bandung village area regarding the importance of taxes and tax payments and also violating compliance with applicable sanctions.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pengaruh pemahaman perpajakan serta kepatuhan membayar pajak usaha pada wajib pajak, serta pengusaha makanan di daerah desa bandung. Di daerah desa bandung ini banyak sekali jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar ataupun masyarakat pendatang, dimana usaha yang mereka jalankan sebagian besar adalah usaha makanan. Yang mana pendapatan suatu daerah itu sebagian besar berasal dari hasil pemungutan pajak baik pajak pribadi maupun pajak usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga informasi data yang digunakan melalui wawancara kepada narasumber atau responden – responden lainnya. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman dan juga kesadaran masyarakat, terutama pada para pengusaha warung makan di daerah desa bandung mengenai pentingnya wajib pajak dan pembayaran pajak dan juga apabila melanggar patuh terhadap sanksi yang berlaku.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Dengan posisi yang sedemikian itu pajak merupakan penerimaan strategis yang dikelola dengan baik. Dalam struktur keuangan Negara tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. (Prabowo 2016)³

Dengan meningkatnya hasil pemungutan pajak di indonesia, yang mana berjalan beriringan dengan tingkat perekonomian di indonesia juga pastinya mengalami sebuah peningkatan. Semua ini dikarenakan pesatnya pembangunan dalam pusat sektor ekonomi, perdagangan ataupun usaha. Menurut bentuk fisiknya, pasar sendiri dibagi menjadi dua bentuk yaitu pasar tradisional dan juga pasar modern. Dengan semakin banyaknya tempat usaha atau usaha baru akan semakin menurunnya tingkat pengangguran, yang mana dengan terbukanya usaha baru akan merekrut tenaga kerja, contohnya pada usaha warung makan baik pelayan, bagian dapur, kasir, dan lainnya.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Setiap usaha yang didirikan oleh masyarakat akan secara otomatis bersangkutan dengan sebuah perpajakan. Banyak di antara masyarakat yang telah mendirikan sebuah usaha, contohnya saja usaha warung makan. Banyak dari para pengusaha warung makan ini, walaupun usahanya masih terbelang kedalam usaha kecil telah sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, namun juga tak sedikit dari masyarakat yang masih belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, banyak sekali alasan mengapa mereka

tidak membayar pajak, seperti halnya kurangnya sosialisasi dari pihak perpajakan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak baik pajak pribadi maupun pajak usaha, sikap masyarakat yang acuh terhadap pajak, dan juga karena tidak mau keuntungannya menjadi berkurang apabila membayar pajak. Serta juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah perpajakan karena mereka juga menganggap bahwa perpajakan ini tidak ada efeknya atau keuntungannya secara langsung terhadap masyarakat.

Dengan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan akan mengakibatkan dan berpengaruhnya pada nilai pendapatan negara. Dimana pemerintah telah berusaha memberikan kemudahan dalam wajib pajak atau perpajakan yang mana berharap agar masyarakat sadar dan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak juga akan sangat berpengaruh pada pendapatan negara, serta pemerintah dapat melakukan pembangunan yang lebih baik pada beberapa sektor, salah satunya sektor ekonomi pada bidang usaha.

Warung makan merupakan usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana yang mana istilah "warung" dapat ditemukan di Indonesia dan Malaysia. Warung juga dapat diartikan sebagai salah satu bagian penting dalam kehidupan keseharian rakyat Indonesia. salah satu jenis warung, yaitu warung makan atau warung nasiyang mana warung ini menjual nasi dan lauk pauk, semacam rumah makan sederhana.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
3. Apakah yang membuat pelaku usaha patuh membayar pajak.

C. TUJUAN

1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.
2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui apa yang membuat pelaku usaha patuh membayar pajak

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN WARUNG MAKANAN

Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana — istilah "warung" dapat ditemukan di Indonesia dan Malaysia. Warung adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan keseharian rakyat Indonesia. Terdapat banyak jenis warung, umumnya berbentuk toko kecil seperti gerobak dorong beratap yang menjual minuman dingin dalam kemasan botol (seperti teh botol), kudapan, permen, rokok, kerupuk, dan berbagai macam barang-barang keperluan sehari-hari. Bahkan terdapat warung terapung, yakni perahu yang difungsikan sebagai warung. Sementara warung yang menjual makanan umumnya dapat menjual panganan sederhana gorengan seperti pisang goreng dan kopi. Selain menjual masakan Indonesia, beberapa warung menjual makanan asia dan barat, makanan seperti nasi goreng dan mi goreng lazim ditemukan di warung. Beberapa warung yang menjual makanan barat bahkan menjual roti, panekuk, sup, ikan bakar, steak dan pizza. Istilah "warung" juga merujuk kepada toko atau kedai, dan menjadi dasar istilah lain, termasuk wartel (kependekan dari warung telepon) dan warnet (kependekan dari warung internet).

B. PENGERTIAN PAJAK

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 (Departemen Keuangan RI, 2007) merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan disebut subjek pajak. Subjek pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif disebut wajib pajak (WP). Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan wajib pajak sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. PENGERTIAN WAJIB PAJAK

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

D. PENGERTIAN PPN

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Pajak Pertambahan Nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non PKP, harus dipahami subjek pajak ini berbeda dengan Wajib Pajak. Subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak sedangkan Wajib Pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Undang-Undang yang Mengatur PPN, yaitu :

Terdapat tiga kali perubahan Undang-Undang PPN di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya pergantian model pemungutan pajak dan peraturan perundang-undangan agar bisa lebih sederhana dan adil untuk masyarakat. Berikut adalah perubahan UU PPN di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPnBM dan disahkan pada 1 April 1985.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, terdapat perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat juga untuk meningkatkan penerimaan negara.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Perubahan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang PPN sebelumnya, Undang-Undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Sampai tahun 2018 ini, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 masih digunakan.

E. KESADARAN MEMBAYAR PAJAK

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini akan membuat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan. (Hardiningsih and Yulianawati 2011)

F. PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN

Indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan menurut Burton (2008:8) adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan NPWP

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang fungsinya sebagai identitas khusus untuk sarana administrasi perpajakan.

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

Apabila wajib pajak telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak maka mereka akan membayar dan melaporkan pajak mereka. Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang jelas dalam undang-undang.

3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan

Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu saja akan mendorong setiap wajib pajak untuk taat dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak

Mengetahui dan memahi PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar.

5. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh (KPP) Kantor Pelayanan Pajak

upaya sosialisasi ketentuan perpajakan merupakan faktor lain keberhasilan mewujudkan masyarakat untuk sadar dan peduli pajak.

6. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan (Hardiningsih and Yulianawati 2011)

G. PERSEPSI YANG BAIK ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN

Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan dan saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain :

1. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.

2. Pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja.

3. Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.

4. Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP.

5. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-Register dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP.

H. JENIS – JENIS DASAR PENGENAAN PAJAK PPN

Terkait dengan dasar pengenaan pajak PPN, tarif pembayaran PPN diatur lewat pasal 7 UU PPN dan PPnBM yang merinci bahwa tarif PPN adalah sebagai berikut:

1. Untuk penyerahan dalam negeri, tarif PPN sebesar 10%.
2. Untuk ekspor BKP berwujud maupun berwujud serta ekspor JKP dikenakan tarif 0%.
3. Tarif pajak terkait ekspor dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%.

Pungutan PPN dengan tarif yang ditetapkan didasarkan atas dasar pengenaan pajak PPN yang meliputi lima nilai, yakni:

1. Harga Jual
2. Penggantian
3. Nilai Impor
4. Nilai ekspor
5. Nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan

I. OBJEK PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut dengan Objek PPN adalah:

- Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- Impor Barang Kena Pajak
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- Kini Anda dapat menuntaskan pelaporan PPN Anda melalui OnlinePajak, aplikasi pajak yang mempermudah dan menghemat waktu Anda secara signifikan.

J. BARANG ATAU JASA YANG DIKENAKAN PPN

Barang atau jasa yang dikenai PPN jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, untuk memudahkan Anda membedakan mana barang yang dikenakan PPN dan tidak.

Berikut adalah daftar barang yang tidak dikenakan PPN:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan PPN meliputi:

- Jasa pelayanan kesehatan medis.
- Jasa pelayanan sosial.
- Jasa pengiriman surat dengan perangko.
- Jasa keuangan.
- Jasa asuransi.
- Jasa keagamaan.
- Jasa pendidikan.(Prabowo 2016)

K. PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN

PPN mengikat pembeli dan penjual. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PPN adalah kewajiban dari pembeli sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Namun, kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN merupakan kewajiban penjual/Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penjual/PKP kemudian melaporkan pemungutan PPN secara akumulatif ke Ditjen Pajak. Bukti pungutan PPN ini disebut dengan faktur pajak. Di dalam sebuah faktur pajak dicantumkan beberapa hal seperti, nama, alamat, barang atau jasa yang dibeli, NPWP, dll. Penjual wajib melaporkan faktur pajak paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi. (Prabowo 2016)

L. SANKSI TELAT LAPOR SPT MASA PPH

Sanksi telat bayar SPT Masa yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

M. SANKSI TELAT LAPOR SPT MASA PPN

Seperti yang kita ketahui bersama, pajak merupakan iuran yang dipungut negara dan sifatnya memaksa. Ada berbagai macam peraturan atau dasar hukum terkait perpajakan yang perlu dimengerti masyarakat agar tidak terkena sanksi di kemudian hari. Salah satu kesalahan yang membuat Anda dikenai sanksi adalah telat melaporkan SPT. Baik SPT Masa PPN maupun SPT masa dan tahunan jenis pajak lainnya.

Lalu, sanksi apa saja yang dikenakan ketika seorang wajib pajak telat dalam melaporkan SPT Masa PPN? Berikut ini sanksi yang bisa dikenakan jika Anda telat lapor SPT:

- Telat lapor SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp500.000.
- Telat lapor SPT Masa jenis pajak lainnya (selain PPN) dikenakan denda sebesar Rp100.000.
- Telat lapor SPT Tahunan PPh orang pribadi akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000.
- Telat lapor SPT Tahunan PPh badan akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000.
- Besar denda yang disebutkan di atas, tidak hanya dikenakan ketika wajib pajak telat dalam melaporkannya. Jika wajib pajak tidak menyampaikan sama sekali, maka sanksi ini juga dapat diberlakukan.

Sanksi Lainnya atas Telat Lapor SPT Masa PPN, yaitu :

Khusus untuk PKP yang juga tidak membuat dan melaporkan faktur pajak, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang menjadi objek transaksi jual-beli.

Lalu, bagaimana perlakuan pemerintah terhadap PKP yang telat lapor SPT Masa PPN padahal faktur pajaknya sudah berstatus *approved*? Jadi, bagi PKP yang sudah membuat faktur pajak kemudian sudah berstatus *approved*, namun tidak atau telat dalam melaporkan SPT Masa PPN, maka akan dikenakan sanksi ganda, yakni:

1. Sanksi sebesar 2% dari DPP karena tidak melaporkan faktur pajak bersama SPT Masa, meski faktur pajak sudah berstatus *approved*.
2. Sanksi administrasi berupa denda Rp500.000 karena telat lapor SPT Masa PPN atau laporan SPT Masa PPN dilakukan tidak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.

N. Setelah mengenal apa saja barang dan jasa yang dikenakan PPN. Sekarang, saatnya membahas besaran tarif yang dikenakan. Penentuan besaran tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

1. Berikut ini daftar tarif dari PPN:
2. Tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanaan.
4. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.
5. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.
6. Tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun, jika kita tidak menemukan keterangan PPN pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk PPN.

O. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini akan membuat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karna menyadari adanya landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

P. Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. (Hardiningsih and Yulianawati 2011)

Q. Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan

Indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan menurut Burton (2008:8) adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan NPWP

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang fungsinya sebagai identitas khusus untuk sarana administrasi perpajakan.

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak Apabila wajib pajak telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak maka mereka akan membayar dan melaporkan pajak mereka. Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang jelas dalam undang-undang.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan

Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu saja akan mendorong setiap wajib pajak untuk taat dan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak),

PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak Mengetahui dan memahi PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar.
5. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh (KPP) Kantor Pelayanan Pajak upaya sosialisasi ketentuan perpajakan merupakan faktor lain keberhasilan mewujudkan masyarakat untuk sadar dan peduli pajak.
6. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan

METODE PENELITIAN

Kami melakukan penelitian di beberapa warung yang berada di desa Bandung, yakni Warung Nasi Campur Bu Sum, Warung Nasi Lontong Bu Sani, Warung Nasi Rawon Bu Badelan, dan Warung Nasi BIMA. Kita melakukan penelitian dengan cara observasi dan juga wawancara untuk mengetahui apakah pelaku usaha di desa Bandungsadar akan kewajiban membayar pajak.

A. JENIS PENELITIAN

Laporan ini tersusun dengan kelengkapan ilmiah yang disebut sebagai metode penelitian, yaitu cara kerja penelitian sesuai dengan cabang – cabang ilmu yang menjadi saran atau obyeknya. Cara kerja tersebut merupakan pengetahuan tentang langkah –langkah sistematis dan logis dalam upaya pencarian data yang berkenaan dengan masalah – masalah penelitian guna diolah, di analisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya mencari solusinya.

Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak diargukan bobot kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya secara ilmiah. Untuk itu dalam bagian ini memberi tempat khusus tentang apa dan bagaimana pendekatan dan jenis penelitian, Obyek penelitian, jenis sumber data, tahapan penelitian,teknik pengumpulan data, analisis data, dan teknik keabsahan data.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka – angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deksriptif.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.

Bodgan dan Taylor mendefinisikann metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif , berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini berasumsi bahwa pengalaman manusia ditengahi penafsiran. Objek, orang, situasi, dan peristiwa tidak memiliki pengertianya sendiri, sebaliknya pengertian itu di berikan untuk mereka.

Penggunaan pendekatan ini didasarkan atas tiga pertimbangan, yaitu: pertama, Pertimbangan teoritis, bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori agama dalam konsep Webber, karena sesuai dengan permasalahan yang ada. Kedua, Pertimbangan praktis, bahwa pendekatan kualitatif akan lebih mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dimana peneliti berhubungan langsung dengan masyarakat yang banyak memahami sosio – kulturenya. Ketiga, pendekatan kualitatif lebih menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian, sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah, dengan cara berfikir normal dan argumentatif. Oleh karena itu pendekatan kualitatif lebih cocok dengan rumusan masalah, yang mana peneliti tidak dalam rangka mencari hipotesa, melainkan dalam rangka mencari jawaban. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yakni suatu jenis penelitian dimana data yang diperoleh disajikan dalam bentuk kata – kata dan gambar bukan angka. Penggunaan jenis penelitian kualitatif karena ada pertimbangan. Pertama, jenis penelitian deskriptif merupakan bagian dari karakteristik pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan deskriptif dengan kata – kata atau gambar, dan bukan yang berupa angka – angka. Kedua, relevansi penelitian deskriptif dengan obyek penelitian, yakni karakteristik latar belakang masyarakat dan sistem sosial di kelurahan Manyar kota Surabaya diharapkan dapat menggambarkan fakta – fakta yang akurat sesuai dengan fenomena sosial yang ada.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

- Lokasi penelitian ini dilaksanakan di beberapa warung makan yang ada di desa Bandung Kec. Bandung Kab. Tulungagung. Agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka kami membatasi ruang lingkup penelitian di Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya

- Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 1 hari.

1. Subyek penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah beberapa warung makan yang ada di desa Bandung Kec. Bandung Kab. Tulungagung. Informan yang ada di dalam penelitian ini yaitu 4 orang pemilik yang ada di dalam warung makan Warung Nasi Campur Bu Sum, Warung Nasi Lontong Bu Sani, Warung Nasi Rawon Bu Badelan, dan Warung Nasi BIMA

2. Sumber data

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan (observasi) merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

C. TAHAP – TAHAP PENELITIAN

Tahap-tahap penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Tahap pra lapangan

Di daerah desa Bandung banyak sekali ditemukan warung warung makan. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi beberapa pengusaha makanan untuk mengambil peluang untuk mendirikan tempat usaha, namun kami penasaran apakah hal ini di dukung dengan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak. Jadi kita memustukan untuk mengambil beberapa sampel warung makan untuk kami jadikan bahan penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini pekerjaan lapangan fokus pada bagaimana mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dan seakurat mungkin.

Saya mewawancarai 4 orang informan yang merupakan pemilik dari warung makan Warung Nasi Campur Bu Sum, Warung Nasi Lontong Bu Sani, Warung Nasi Rawon Bu Badelan, dan Warung Nasi BIMA

c. Tahap analisa data

Setelah semua data terkumpul kemudian kami melakukan klarifikasi data, pada proses ini pemilihan data untuk menyesuaikan data yang sesuai kebutuhan. Kemudian data yang sudah terkumpul maka kami memilih teori yang sesuai sebagai alat analisis masalah yang terungkap dilapangan.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yakni membeicarakan tentang bagaimana cara peneliti mengumpulkan data. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa, metode dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Metode Pengamatan (observasi)

Observasi adalah kegiatan yang setiap saat manusia lakukan dengan perlengkapan panca indra. Karl mendefinisikan observasi sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme (insitusi). Teknik ini didasarkan atas pengamatan langsung yang memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, dapat mencatat peristiwa dalam situasi yang berkenaan dengan pengetahuan yang diperoleh dari data. Peneliti dapat mengecek benar atau tidaknya informan yang memberikan informasi.

b. Metode Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan dan jawaban informan dicatat atau jika memungkinkan direkam dengan alat perekam. Metode ini dilakukan dengan cara observasi terlibat untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber informasi.

c. Studi Pustaka

Teknik menumpulkan data dengan menggunakan buku atau refrensi sebagai penunjang penelitian. Dengan melengkapi dan mencari data-data yang dibutuhkan dari literatur, makalah dan lain sebagainya. Disini peneli memperoleh data-data yang tertulis telaah bacaan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

d. Data Online

Data ini diperoleh peneliti dengan cara melakukan penelusuran melalui media online yaitu internet dengan memanfaatkan jasa search engine untuk mengakses jurnal, E-book dan lain sebagainya.

e. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pencarian data dilapangan yang berbentuk gambar/arsip dan data-data tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

NO	WARUNG	LOKASI	MEMBAYAR PAJAK	KETERANGAN
1.	WARUNG NASI CAMPUR BU SUM	BANDUNG	X	Kurangnya edukasi pajak, merasa pendapatan berkurang jika membayar pajak.
2.	WARUNG LONTONG SAYUR BU SAINI	BANDUNG	X	Kurangnya edukasi pajak, kurangnya etika sosial.
3.	WARUNG NASI RAWON BU BADELAN	BANDUNG	✓	Warung ini mebayar PPh, dengan rutin.
4.	WARUNG NASI PECEL BIMA	BANDUNG	✓	Warung ini membayar PPh dan PPn dengan rutin.

- Yang mendasari WARUNG NASI CAMPUR BU SUM dan WARUNG LONTONG SAYUR BU SAINI tidak membayar pajak :
  1. Kurangnya Edukasi Pajak.

Kedua warung ini mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi ataupun edukasi pajak dari pihak terkait membuat banyak masyarakat menjadi tidak mengerti, tidak tahu, bahkan istilah pajak asing ditelinga mereka. Yang mana selain itu juga membuat kesadaran wajib pajak atau masyarakat mengenai masalah perpajakan ini menjadi sangat kurang baik, dan bahkan sangat minim sekali. Karena pemikiran mereka pajak tersebut tidak ada untungnya, atau tidak ada dampak baik yang mereka rasakan secara langsung. Ditambah lagi adanya kasus – kasus korupsi yang ada di Indonesia yang mana sangat merugikan negara dan itu semua adalah uang rakyat. Dari hal – hal inilah munculnya sebuah pemikiran atau perspektif masyarakat atau wajib pajak untuk tidak membayar pajak dan bersifat acuh, yang mana selain itu juga membuat wajib pajak tidak memiliki atau tidak adanya sebuah kemauan untuk membayar, melapor dan patuh pada ketentuan pajak. Tanpa mereka sadari bahwa perbuatan tidak membayar dan melapor pajak ini sudah sangat merugikan negara terutama pada sebuah pendapatan negara. Selain itu juga karena sebuah pemikiran tamak atau serakah yang mana tidak mau dirugikan sedikitpun, dan akan selalu mau apabila diuntungkan, pemikiran mereka inilah bahwa apabila membayar pajak akan membuat keuntungan yang mereka dapatkan dari penjualan makanan di warungnya menjadi menurun atau berkurang. Oleh karena beberapa faktor tersebut kedua warung ini tidak mau membayar ataupun melaporkan pajaknya.

Namun hal ini tidak begitu saja dapat dibenarkan, karena banyak media dalam negeri mengabarkan tentang bagaimana tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak. Juga terdapat beberapa studi atau penelitian yang berkaitan dengan seputar hal tersebut. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak merupakan hal yang mendasar sekali. Merupakan suatu wujud sikap yang seiring sejalan dan merupakan satu kesatuan momentum yang harus dapat ditangkap oleh DJP dalam mencapai targetnya. Sejak tahun 2008 terutama sejak peluncuran program sunset policy, program PWPM menyusul modernisasi DJP, jumlah wajib pajak semakin meningkat dan penerimaan negara dari sektor pajak pun turut meningkat tajam. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya: dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak pun mempunyai pengaruh dan dampak positif terhadap meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya. Jadi sebagai warga Negara sudah seharusnya muncul dalam diri untuk sadar dalam hal membayar pajak.

Kelalaian dalam membayar pajak ini jelas ada sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang tidak membayar pajak yaitu bagi Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan, tidak

memiliki NPWP, atau menyalahgunakannya, sehingga merugikan negara, akan dipidana paling lama 6 (enam) tahun penjara, dan didenda paling banyak 4 (empat) kali lebih besar jumlah pajak terutang yang belum atau kurang bayar. Dan sanksi telat bayar SPT Masa yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jadi jika ada solusi yang bisa menjadi jalan keluar dalam permasalahan ini, salah satunya dengan mendatangi langsung wajin pajak, Mendatangi langsung wajib pajak merupakan strategi yang cukup efektif karena petugas pemungut pajak bisa langsung berinteraksi dengan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang di datangi belum bisa membayar, petugas pemungut pajak bisa mengetahui kendala yang dialami wajib pajak sehingga belum bisa membayarkan Pajak.

2. Merasa Apabila Membayar Pajak Merupakan Hal Yang Membebani

Salah satu informan sedikit menyinggung bahwa membayar pajak sedikit membebani bagi pedagang seperti dirinya, mereka beranggapan bahwa sebaiknya pemerintah tidak mengenakan pajak bagi pelaku usah yang masih kecil. Dia berharap usaha mereka dibiarkan berkembang terlebih dahulu.

Hal ini merupakan hal yang jelas tidak dibenarkan, padahal penerimaan negara dari sektor pajak sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor. Untuk itu, lewat program tax amnesty pelaku UMKM diminta untuk berkontribusi ke penerimaan negara dengan membayar pajak penghasilan. Untuk itu, para pedagang yang belum patuh membayar pajak diajak untuk memanfaatkan haknya ikut tax amnesty. Dengan tarif tebusan yang kecil, pedagang nantinya bisa bernafas lega dan tidak dihantui pajak terutang dari tahun 2015 ke belakang.

Potensi pajak dari sektor UMKM ini sangat besar. Terutama pada sektor pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pada sektor pajak penghasilan, UMKM menyumbang pajak yang berasal dari penghasilan pribadi dan PPh pasal 21. Dalam Pajak Pertambahan Nilai, UMKM juga berperan besar dalam memberikan kontribusi penerimaan negara. Secara umum mata rantai perdagangan pedagang kecil berada pada tingkat terakhir. Berikut ilustrasi keberadaan pedagang kecil dalam mata rantai perdagangan. ada sanksi administrasi yang akan dikenai kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi. Seperti kita ketahui, dalam PPh Final UMKM, tanggal pembayaran dianggap juga sebagai tanggal pelaporan SPT Masa

PPh Final. Jadi, ketika wajib pajak terlanjur memanfaatkan Insentif PPh Final UMKM DTP, namun belakangan ternyata tidak berhak memanfaatkan insentif tersebut karena tidak menyampaikan laporan realisasi, terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final UMKM sekaligus pelaporan SPT Masa PPh Final. Di sinilah letak permasalahannya. Wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan (maksimal 24 bulan) dari nilai yang terlambat dibayar atas keterlambatan pembayaran PPh Final UMKM. Di samping itu, wajib pajak juga akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Final.

3. Kurangnya Etika Sosial Para Pelaku Usaha

Dari riset kami, terlihat bahwa responden masih menganggap remeh mengenai membayar pajak. Jika dapat dituliskan mereka masih mempertanyakan mengenai pentingnya membayar pajak kepada pemerintah. Sikap inilah yang harus dihilangkan, ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya menjadi masalah menahun. Padahal jelas bahwa membayar pajak sangat penting bagi kelangsungan Negara ini, banyak manfaat yang didapat dari membayar pajak yaitu membiayai pembangunan infrastruktur, membiayai fasilitas kesehatan, dan untuk mendirikan fasilitas kesehatan.

- Dan untuk WARUNG NASI RAWON BU BADELAN dan WARUNG NASI PECCEL BIMA memiliki beberapa alasan untuk membayar pajak.

1. Karena Memahami Bahwa Membayar Pajak Merupakan Hal Yang Penting

Kedua responden memahami bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban mereka karena mendirikan tempat usaha. Walau mereka tidak merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena mereka sadar bahwa pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Untuk kedua warung yang sudah taat dan patuh untuk membayar pajak atau melaporkan pajaknya memiliki beberapa alasan dan faktor penunjang yang akhirnya membuat mereka sadar dan memiliki kemauan membayar pajak. Alasan dan faktornya yaitu mereka lebih memiliki pemikiran yang modern dan terbuka, dan mereka juga sadar bahwa sebagai pelaku usaha memanglah harus membayar dan melaporkan pajaknya, sebenarnya tidak hanya pelaku usaha saja, namun juga wajib pajak berlaku pada perorangan. Selain itu juga adanya peringatan dan pemberitahuan dari pihak kantor pajak mengenai perpajakan yang menjadi kewajiban mereka, dan juga mereka sadar apabila tidak membayar pajak mereka akan dikenakan sanksi ataupun denda dan bahkan apabila melanggar ketentuan yang berlaku bisa

sampai ijin usaha mereka nantinya dicabut, dan malah merugikan mereka sendiri. Serta mereka memiliki rasa peduli terhadap sesama dan mereka ingin menjadi dan memenuhi tugas warga negara yang baik dengan patuh dan taat melapor dan membayar pajak secara rutin.

- Mereka Sadar Bahwa Ada Hukum Yang Mengikat

berikut ini berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia.

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No. 16/2000.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 17/2000.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No. 8/1983 dan diganti menjadi UU No. 18/2000.
4. Undang-undang penagihan pajak dan surat paksa yang diatur dalam UU No. 19/1997 dan diganti menjadi UU No. 19/2000.
5. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU NO. 14/2002.

- Contoh Transaksi Yang Dilakukan WARUNG NASI PECCEL BIMA

➤ Transaksi 1 warung bima

Nasi pecel	5	Rp @6000	Rp 30.000
Es teler eksotik	3	Rp @8000	Rp 24.000
Es punch leci	2	Rp @15.000	Rp 30.000
		Total	Rp 84.000
		PPN	Rp 8. 400
		Total	Rp 92.400

Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp } 84.000 \\ &= 8.400 \end{aligned}$$

Transaksi 2 warung bima

Mie mercon	12	@13.000	Rp 156.000
Jus semangka	4	@9.000	Rp 36.000
Es kopi	5	@11.000	Rp 55.000
Es cappucino	3	@14.000	Rp 42.000
Total			Rp 289.000
PPN			Rp 28.900
Total			Rp 317.900

Perhitungan :

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp } 289.000$$

$$= \text{Rp } 28.900$$

KESIMPULAN

- PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan.
- Sejak tanggal 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-Faktur atau faktur pajak elektronik sebagai prasyarat pelaporan SPT Masa PPN.
- Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya.
- Pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.
- Kesadaran akan pentingnya membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi
- Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi “ Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”, dapat dinyatakan terbukti kebenarannya.
- Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi “ Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”, dapat dinyatakan terbukti kebenarannya.
- Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat yang berbunyi “Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap
- Diharapkan agar pihak pemerintah dan dinas terkait dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui pengaruh apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sesuai dengan hasil studi ini.
- Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau mengembangkan mengenai studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiningsih, Pancawati, and Nila Yulianawati. 2011. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.” *Dinamika Keuangan Dan Perbankan* 3 (1): 126–42.
- Prabowo, Rachmad Gesah Mukti. 2016. “MEKANISME PEMUNGUTAN PPN Dan PPnBM.”